

Kelangkaan Sumber Daya Air pada Musim Kemarau 2026 dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Data Sekunder di Kabupaten Cilacap dalam Perspektif Ekonomi Islam

Selvi Regita Cahyani¹, Sarpini²

¹Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

²Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

*Penulis Korespondensi: selviregita.2006@gmail.com, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract. *In early July 2026, news reports documented clean-water deliveries to eight villages in Cilacap Regency. In August, one outlet reported assistance for 29 villages through 232 water tanks, while three reports published on 9-10 October cited 89 villages and 1,500 tanks. The October figures should be interpreted cautiously because the reporting cut-off and coverage definitions were not specified in detail, and the outlets may have relied on the same statement from the Cilacap Regional Disaster Management Agency (BPBD). The similar figures therefore do not amount to independent verification or establish a measured endpoint of a trend. This study describes reported difficulties in accessing clean water in Cilacap during the 2026 dry season, examines welfare implications that can be supported by the available evidence, and interprets the case through Islamic economics. It uses a descriptive qualitative approach based on documentary analysis of secondary news reports citing BPBD and relevant scholarly literature. The sources document the reported scale of the event and the relief response, but do not provide data on household water expenditure, lost income, agricultural disruption, or health outcomes. The welfare analysis is therefore limited to access to basic needs and access difficulties explicitly reported in the sources. From the perspective of maqashid al-shariah, clean-water distribution is consistent with the protection of life (hifz al-nafs), whereas distributive justice cannot be assessed adequately without village-level recipient data and transparent prioritisation criteria.*

Keywords: *water scarcity; drought; community welfare; maqashid al-shariah; Cilacap Regency*

Abstrak. Pada awal Juli 2026, pemberitaan mencatat penyaluran bantuan air bersih ke delapan desa di Kabupaten Cilacap. Pada Agustus, satu media melaporkan bantuan untuk 29 desa melalui 232 tangki, sedangkan tiga laporan yang terbit pada 9-10 Oktober menyebut 89 desa dan 1.500 tangki. Angka Oktober perlu ditafsirkan secara hati-hati karena batas waktu pencatatan dan definisi cakupannya tidak dijelaskan secara rinci, sementara laporan-laporan tersebut mungkin merujuk pada keterangan BPBD yang sama. Karena itu, kesamaan angka antarmedia tidak diperlakukan sebagai verifikasi independen atau ukuran akhir dari tren yang telah terukur. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kelangkaan akses air bersih di Cilacap pada musim kemarau 2026, menelaah implikasinya terhadap kesejahteraan berdasarkan bukti yang tersedia, dan menganalisisnya melalui perspektif Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa pemberitaan yang mengutip BPBD Kabupaten Cilacap dan literatur ilmiah yang relevan. Sumber yang dianalisis menggambarkan cakupan kejadian dan respons bantuan, tetapi tidak menyediakan data mengenai biaya air rumah tangga, kehilangan pendapatan, gangguan pertanian, atau dampak kesehatan. Oleh sebab itu, analisis kesejahteraan dibatasi pada akses terhadap kebutuhan dasar dan kesulitan memperoleh air yang secara eksplisit dilaporkan. Dalam kerangka maqashid syariah, penyaluran air bersih sejalan dengan upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs), sedangkan keadilan distribusi belum dapat dinilai secara memadai karena data penerima per wilayah dan kriteria penentuan prioritas tidak tersedia.

Kata kunci: kelangkaan air; kekeringan; kesejahteraan masyarakat; maqashid syariah; Kabupaten Cilacap

1. LATAR BELAKANG

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang ketersediaannya dipengaruhi oleh kondisi musim dan kapasitas sumber air setempat. Ketika kemarau berlangsung, sumur dan mata air dapat menurun pasokannya sehingga sebagian warga memerlukan bantuan pemerintah daerah. Di Kabupaten Cilacap, pemberitaan menyebutkan bahwa hingga 2 Juli 2026 telah disalurkan 117.000 liter air bersih melalui 24 tangki ke delapan desa di enam kecamatan (Lingkar, 2026a). VIVA Banyumas (2026) pada 9 Agustus menyebut 29 desa dan 232 tangki, sedangkan tiga laporan yang terbit pada 9-10 Oktober mencantumkan 89 desa dan 1.500 tangki (Banyumas Ekspres, 2026c; Ketik, 2026; Radar Banyumas, 2026b). Batas waktu pencatatan dan definisi cakupan angka Oktober tidak dijelaskan, sementara ketiga media mungkin merujuk pada keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sama. Kesamaan angka tersebut menunjukkan konsistensi pemberitaan, bukan verifikasi independen atau dasar yang cukup untuk mengukur peningkatan cakupan secara pasti.

Keterangan BPBD yang dikutip pada pertengahan Juli menyebutkan bahwa beberapa desa yang mengajukan bantuan hampir setiap tahun mengalami kekeringan (Lingkar, 2026b). Informasi ini mengisyaratkan bahwa kesulitan memperoleh air bersih bukan sekadar persoalan sesaat bagi desa-desa tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan pengukuran curah hujan aktual atau data rumah tangga, sehingga pola berulang itu dipahami sebagai informasi yang dilaporkan, bukan hasil pengukuran klimatologis atau survei. Meskipun demikian, informasi tersebut relevan untuk membahas tata kelola bantuan, akses terhadap kebutuhan dasar, dan keberlanjutan pengelolaan sumber air.

Penelitian terdahulu telah mengkaji kekeringan dari sudut teknis dan sosial-ekonomi. Faizah et al. (2023) memetakan kerawanan kekeringan lahan sawah di Kabupaten Purworejo dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan sistem informasi geografis, sedangkan Purnomo et al. (2021) menilai kekeringan di utara Kabupaten Lumajang melalui indeks SPI dan data penyaluran air bersih, lalu membahas alternatif mitigasi seperti embung, waduk, dan pemanfaatan air tanah. Dimensi sosial muncul pada Mulyono dan Priantika (2023), yang menguraikan tindakan warga Dusun Tlogopule, Kabupaten Tuban, memenuhi kebutuhan air saat kekeringan, serta Mustofa et al. (2022), yang memperoleh indeks kerentanan sosial 0,41 (kategori menengah) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Putri dan Samsuddin (2025) menemukan hubungan negatif dan

signifikan antara akses air minum layak dan kemiskinan dalam panel kabupaten di Jawa Barat 2020-2024. Dari sisi Ekonomi Islam, Hamdi et al. (2025) menghubungkan maqashid syariah, fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), dan etika Islam dalam tata kelola air di Indonesia, sedangkan Mallongi et al. (2025) menelaah perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) dalam pengelolaan mata air. Perbedaan lokasi, periode, dan metode membuat penelitian-penelitian tersebut berfungsi sebagai pembandingan analitis, bukan bukti langsung tentang kondisi Cilacap pada 2026.

Berdasarkan literatur yang berhasil ditelaah, belum ditemukan penelitian yang secara khusus memadukan kronologi pemberitaan bantuan air di Cilacap pada musim kemarau 2026, bukti mengenai akses terhadap kebutuhan dasar, dan pembacaan normatif melalui Ekonomi Islam. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis kontekstual atas pertemuan ketiga aspek tersebut, dengan kesimpulan yang sengaja dibatasi sesuai data yang tersedia; klaim ini berlaku dalam cakupan literatur yang ditelaah dan tidak berarti bahwa kelangkaan air, kesejahteraan, atau nilai Islam belum pernah dibahas sebelumnya. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menggambarkan kondisi kelangkaan akses air bersih di Kabupaten Cilacap berdasarkan data sekunder, mengidentifikasi implikasi kesejahteraan yang dapat ditarik dari bukti yang tersedia, dan menafsirkan respons penanganan melalui prinsip Ekonomi Islam, khususnya kemaslahatan, keadilan distribusi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. KAJIAN TEORETIS

Kekeringan secara umum merujuk pada keadaan ketika ketersediaan air menurun di bawah kondisi normal selama periode tertentu (Faizah et al., 2023). Secara konseptual, kekeringan dibedakan menjadi kekeringan meteorologis (defisit curah hujan), hidrologis (penurunan aliran sungai atau air tanah), dan pertanian (kekurangan air bagi tanaman). Dalam penelitian ini, kelangkaan air digunakan secara operasional untuk menggambarkan kesulitan memperoleh air bersih sebagaimana tercermin dalam pemberitaan tentang kebutuhan warga dan penyaluran bantuan di Cilacap. Perbedaan tersebut memisahkan kondisi fisik kekeringan dari kesulitan rumah tangga memperoleh air, sehingga jumlah bantuan tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung intensitas kekeringan meteorologis. Curah hujan kemarau sekitar 45 mm per bulan di Purworejo (Faizah et al., 2023) memberikan konteks dari wilayah lain di Jawa Tengah, tetapi tidak dapat dipakai untuk memperkirakan kondisi Cilacap; demikian pula embung, waduk, dan pemanfaatan air

tanah dalam Purnomo et al. (2021) menjadi pembanding, bukan rekomendasi otomatis bagi Cilacap.

Kesejahteraan masyarakat ditelaah melalui empat dimensi yang berkaitan dengan akses air: pemenuhan kebutuhan untuk minum, memasak, dan menjaga kebersihan; beban memperoleh air (jarak, waktu, biaya, dan ketergantungan pada bantuan); kondisi sosial-ekonomi (pendapatan, pengeluaran, mata pencaharian, kemiskinan); serta kesehatan. Keempat dimensi ini merupakan kerangka analisis, bukan pernyataan bahwa seluruh indikatornya tersedia dalam sumber Cilacap, yang terutama memuat penyaluran bantuan dan sebagian kesulitan akses. Hubungan statistik antara akses air minum layak dan kemiskinan pada tingkat kabupaten (Putri & Samsuddin, 2025) berguna sebagai pembanding tetapi tidak membuktikan perubahan kemiskinan di Cilacap pada 2026, sedangkan Mustofa et al. (2022) menekankan bahwa kerentanan sosial berbeda antarkelompok.

Tata kelola bantuan air mencakup pihak penyalur, sumber pembiayaan, wilayah dan penerima, serta dasar penentuan prioritas. Distribusi dianalisis melalui empat dimensi: keterjangkauan (kemampuan warga memperoleh air tanpa beban berlebihan), kesinambungan (frekuensi dan keberlanjutan pengiriman), transparansi (keterbukaan informasi penerima, pendanaan, dan kriteria), serta pemerataan (cakupan antarwilayah dan antarkelompok). Pemberitaan memuat sebagian informasi pendanaan, jumlah tangki, volume air, cakupan desa, dan jumlah penerima pada tanggal tertentu. Informasi itu menggambarkan respons administratif, tetapi tanpa data frekuensi pengiriman, biaya rumah tangga, kriteria prioritas, dan rincian penerima per desa, penilaian atas keempat dimensi tetap terbatas.

Maqashid syariah merujuk pada tujuan pokok syariat yang secara umum meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hamdi et al. (2025) menghubungkannya dengan masalah (kemaslahatan publik), 'adl (keadilan), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah; Mallongi et al. (2025) menekankan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) bagi keberlanjutan sumber air; dan Sukarni (2014) membahas kedudukan air dalam perspektif Islam serta tanggung jawab menjaga sumber daya yang menopang kehidupan bersama. Konsep-konsep ini digunakan sebagai lensa normatif untuk menelaah arah respons dan pilihan pengelolaan air, dengan tetap membedakan informasi empiris dari penafsiran teoretis. Agar berfungsi sebagai alat

analisis, setiap prinsip dihubungkan dengan indikator yang benar-benar tersedia dalam pemberitaan (Tabel 1). Jika indikator tidak ditemukan, hasilnya dinyatakan belum dapat dinilai; ketiadaan informasi tidak dianggap sebagai bukti bahwa suatu prinsip terpenuhi ataupun dilanggar.

Tabel 1. Kerangka analisis maqashid syariah dan indikator dari sumber

Prinsip	Pertanyaan analitis	Indikator dari sumber	Batas data
<i>Hifz al-nafs</i>	Apakah kebutuhan air dasar terlayani?	Jumlah KK/jiwa penerima, volume, dan jumlah tangki	Kecukupan harian tidak diketahui
<i>Maslahah</i>	Apakah respons bermanfaat luas dan berkelanjutan?	Sumber APBD dan CSR; perluasan wilayah layanan	Dampak jangka panjang tidak diukur
<i>'Adl</i>	Apakah distribusi adil dan tepat sasaran?	Jumlah desa dan kecamatan; laporan pengiriman	Kriteria prioritas dan rincian per desa tidak tersedia
<i>Hifz al-mal</i>	Apakah harta rumah tangga terlindungi?	Data biaya dan pendapatan tidak tersedia	Biaya air dan pendapatan tidak dilaporkan
<i>Khalifah / hifz al-bi'ah</i>	Apakah sumber air dijaga berkelanjutan?	Keterangan BPBD tentang desa langganan kekeringan	Data konservasi sumber air tidak tersedia

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi dokumentasi atas data sekunder. Peneliti tidak melakukan survei, wawancara, observasi lapangan, ataupun pengukuran langsung; temuan empiris karenanya dibatasi pada informasi yang dapat ditelusuri dalam dokumen dan pemberitaan yang dianalisis. Data kejadian dihimpun dari pemberitaan daring yang terbit pada Juli hingga Oktober 2026 dan memuat keterangan BPBD Kabupaten Cilacap, yaitu Lingkar, Banyumas Ekspres, Radar Banyumas, VIVA Banyumas, dan Ketik. Berita dimasukkan apabila terbit pada 2026, memuat informasi relevan mengenai waktu, wilayah, jumlah bantuan, atau penerima, serta mengaitkannya dengan BPBD atau pejabat berwenang. Pemberitaan diperlakukan sebagai sumber sekunder, bukan pengganti laporan primer BPBD, dan pemberitaan dari daerah lain tidak digunakan sebagai bukti kejadian di Cilacap. Prakiraan musim BMKG hanya digunakan sebagai konteks meteorologis, bukan data curah hujan aktual di desa terdampak.

Literatur ilmiah ditelusuri melalui pencarian web dengan kata kunci yang berkaitan dengan kekeringan, kelangkaan air bersih, kesejahteraan, kerentanan sosial, tata kelola

air, maqashid syariah, dan hifz al-bi'ah, serta melalui daftar rujukan yang tersedia bagi penulis. Karena tidak mengikuti protokol baku pada basis data tertentu, proses ini tidak diklaim sebagai tinjauan pustaka sistematis. Artikel dikelompokkan menurut tema dan dibandingkan berdasarkan fokus, metode, lokasi, dan temuannya; literatur berfungsi sebagai landasan konseptual dan pembanding, sedangkan analisis utama berfokus pada kejadian di Cilacap pada 2026.

Data disusun menurut tanggal kejadian atau pencatatan yang disebut dalam berita, bukan hanya tanggal publikasi. Perbedaan antara periode akumulasi dan data pada satu waktu, serta perbedaan istilah dan cakupan yang dapat membuat angka tidak sebanding, dicatat. Perbandingan antarmedia dipakai untuk menilai konsistensi pemberitaan, tetapi tidak dianggap triangulasi independen apabila media mengutip narasumber yang sama. Temuan kemudian ditelaah dengan kerangka kesejahteraan dan Ekonomi Islam, dengan memisahkan fakta yang diberitakan dari penilaian normatif.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, laporan primer BPBD belum diperoleh sehingga angka dalam pemberitaan tidak dapat diperiksa langsung terhadap dokumen sumber. Kedua, data curah hujan aktual BMKG pada lokasi terdampak belum dianalisis. Ketiga, informasi rinci tingkat desa atau rumah tangga, termasuk frekuensi distribusi, biaya air, mata pencaharian, dan karakteristik kelompok rentan, belum tersedia memadai. Hasil penelitian karenanya menggambarkan informasi yang diberitakan, bukan pengukuran menyeluruh atas dampak sosial-ekonomi kekeringan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kelangkaan Air dan Respons Bantuan di Cilacap, 2026

Sebagai konteks meteorologis, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprakirakan awal musim kemarau 2026 di wilayah Cilacap umumnya pada Mei, dengan puncak pada Agustus dan sifat hujan bawah normal hingga normal (BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, 2026). Informasi tersebut berupa prakiraan, bukan pengukuran curah hujan aktual di desa yang disebut dalam pemberitaan, sehingga tidak digunakan untuk menetapkan intensitas kekeringan pada lokasi tertentu. Kronologi pemberitaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kronologi kelangkaan air dan bantuan air bersih, Kabupaten Cilacap, 2026

Data per	Wilayah menurut sumber	Definisi wilayah dalam laporan	Bantuan air	Penerima	Sumber
2 Juli	8 desa, 6 kecamatan	Wilayah yang menerima bantuan/tercatat kesulitan air dalam laporan	24 tangki (117.000 L)	-	Lingkar (2026a)
5 Juli	8 desa, 6 kecamatan	Wilayah yang dilaporkan mengalami kesulitan air	-	1.063 KK; 3.942 jiwa	Banyumas Ekspres (2026a)
8 Juli	9 desa, 7 kecamatan	Cakupan desa dalam laporan; definisi rinci tidak dijelaskan	31 tangki (161 ribu L)	-	Banyumas Ekspres (2026b)
16 Juli	15 desa, 9 kecamatan	Desa yang mengajukan bantuan	74 tangki (±390 ribu L)	4.071 KK; 14.267 jiwa	Lingkar (2026b)
30 Juli	22 desa, 12 kecamatan	Desa yang mengalami kesulitan air bersih menurut judul/laporan	163 tangki (833.000 L)	6.519 KK; 20.498 jiwa	Radar Banyumas (2026a)
8 Agustus	29 desa	Desa yang disebut terdampak dalam laporan	232 tangki (±1,18 juta L)	24.934 warga	VIVA Banyumas (2026)
Oktober (tanggal data tidak disebut)	89 desa	Desa yang disebut terdampak; batas waktu dan definisi cakupan tidak dirinci	1.500 tangki	-	Ketik (2026); Banyumas Ekspres (2026c); Radar Banyumas (2026b)

Catatan: Angka tidak dijumlahkan antarbaris karena laporan dapat mencakup periode akumulasi yang berbeda; definisi wilayah mengikuti istilah tiap sumber dan tidak selalu sebanding. Tanda “-” berarti tidak dilaporkan. Baris Oktober merangkum laporan Ketik, Banyumas Ekspres, dan Radar Banyumas (9-10 Oktober) yang menyebut angka serupa tanpa merinci batas waktu pencatatan dan definisi cakupan; karena kemungkinan merujuk pada keterangan BPBD yang sama, kesamaan angka tidak dianggap verifikasi independen.

Tabel 2 memperlihatkan tiga pola yang perlu dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan definisi dan tanggal pencatatan. Pertama, jumlah desa yang disebut bertambah dari waktu ke waktu, tetapi tidak sepenuhnya sebanding karena sumber memakai kategori berbeda: desa yang mengajukan bantuan (15 desa di sembilan kecamatan pada 16 Juli;

Lingkar, 2026b), desa yang mengalami kesulitan air (22 desa di 12 kecamatan pada 30 Juli; Radar Banyumas, 2026a), hingga desa yang disebut terdampak (29 desa pada 8 Agustus dan 89 desa pada Oktober). Karena angka Oktober tidak jelas batas waktunya, ia belum cukup untuk mengukur pasti peningkatan cakupan sejak Agustus.

Kedua, jumlah penerima yang tercantum pada laporan Juli adalah 3.942 jiwa (5 Juli), 14.267 jiwa (16 Juli), dan 20.498 jiwa (30 Juli); angka ini merupakan penerima pada masing-masing laporan, bukan seluruh penduduk terdampak. Banyumas Ekspres (2026b) juga menyebut sekitar 83 ribu warga berpotensi terdampak, tetapi karena merupakan perkiraan potensi, angka itu hanya dijadikan konteks dan tidak disamakan dengan data penerima. Ketiga, dari 833.000 liter yang diberitakan telah disalurkan hingga 30 Juli, 450.000 liter (90 tangki) berasal dari APBD Kabupaten Cilacap dan 383.000 liter (73 tangki) dari bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Radar Banyumas, 2026a). Hal ini menunjukkan keterlibatan anggaran daerah dan mitra, tetapi belum cukup untuk menilai apakah pendanaan sebanding dengan kebutuhan.

Volume bantuan sengaja tidak dibagi jumlah penerima untuk menghasilkan rasio liter per jiwa, sebab periode akumulasi volume, tanggal pencatatan penerima, dan frekuensi pengiriman tidak dijelaskan; penghitungan semacam itu memberi kesan kecukupan air yang tidak dapat didukung data. Kesulitan akses digambarkan lebih konkret oleh Lingkar (2026a): warga Dusun Bondan, Desa Ujungalang, Kecamatan Kampunglaut, harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan perahu untuk memperoleh air bersih.

B. Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Implikasi kesejahteraan yang dapat dibahas secara bertanggung jawab terutama berkaitan dengan akses terhadap kebutuhan dasar dan kesulitan memperoleh air yang dinyatakan eksplisit dalam pemberitaan. Hingga 30 Juli, 6.519 kepala keluarga atau 20.498 jiwa tercatat sebagai penerima bantuan; sebagian warga harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan perahu; penyaluran melibatkan pemerintah daerah dan mitra (Radar Banyumas, 2026a); dan BPBD menyebut sebagian desa hampir setiap tahun mengalami kekeringan (Lingkar, 2026b). Secara bersama-sama, informasi ini memperlihatkan kebutuhan akan bantuan dan kemungkinan berulangnya kesulitan akses di wilayah tertentu, tetapi belum menjelaskan seberapa cukup air yang diterima setiap rumah tangga.

Sebaliknya, sumber tidak menyajikan data pengeluaran rumah tangga untuk membeli air, kehilangan pendapatan, gangguan pertanian, kondisi kesehatan, atau perubahan kemiskinan. Jumlah desa terdampak dan volume bantuan menggambarkan cakupan kejadian dan respons, bukan bukti penurunan pendapatan atau peningkatan kemiskinan. Beban waktu dan tenaga memperoleh air serta risiko kesehatan yang mungkin menyertainya tetap relevan sebagai pertanyaan penelitian lanjutan, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai temuan. Dengan demikian, implikasi yang paling kuat didukung data ialah adanya gangguan akses terhadap kebutuhan dasar di wilayah yang memerlukan bantuan air; konsekuensi ekonomi yang lebih luas memerlukan data langsung tentang biaya air, perubahan pendapatan dan mata pencaharian, serta informasi dinas pertanian dan kesehatan.

Temuan Mulyono dan Priantika (2023) bahwa rumah tangga di daerah kekeringan dapat membeli air, mencari sumur di wilayah lain, berlangganan layanan, menerima bantuan, atau menampung air hujan belum dapat dikonfirmasi untuk Cilacap, karena sumber yang tersedia baru mencakup penyaluran bantuan dan satu laporan perjalanan dengan perahu. Demikian pula, meskipun Mustofa et al. (2022) menekankan kerentanan sosial antarkelompok, data Cilacap belum menguraikan penerima menurut usia, kondisi ekonomi, atau disabilitas.

C. Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Analisis berikut memisahkan fakta empiris yang diberitakan dari penilaian normatif, agar kesesuaian arah suatu respons dengan nilai Islam tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa hasil dan pemerataan kebijakannya telah terukur.

Perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Pemberitaan mencatat bantuan air yang menjangkau puluhan ribu jiwa, sehingga ada respons terhadap kebutuhan air bersih. Dalam kerangka maqashid syariah, penyediaan air untuk minum, memasak, dan kebersihan selaras dengan upaya menjaga jiwa karena air menopang kehidupan. Namun, kesesuaian arah tidak membuktikan bahwa kebutuhan setiap penerima terpenuhi; penilaian kecukupan memerlukan data volume per wilayah, frekuensi distribusi, dan kebutuhan rumah tangga.

Kemaslahatan publik (maslahah). Pembiayaan bantuan melibatkan APBD dan CSR, dengan penyaluran bertahap mengikuti kebutuhan yang dilaporkan desa (Radar Banyumas, 2026a). Kerja sama ini dapat dipahami sebagai upaya memperluas manfaat

penanganan. Keterangan tentang desa yang berulang kali mengalami kekeringan juga menunjukkan perlunya langkah jangka panjang di samping bantuan darurat, meskipun manfaat jangka panjang pola penanganan tersebut belum dapat diukur.

Keadilan distribusi ('adl). Pemberitaan memuat jumlah desa, kecamatan, dan tangki, tetapi tidak merinci kriteria prioritas, distribusi per desa, atau kelompok rentan yang didahulukan, sehingga keadilan distribusi belum dapat dinilai secara empiris. Mekanisme yang hanya merespons permohonan desa berpotensi tidak menjangkau wilayah yang kebutuhannya belum tersampaikan; hal ini pertimbangan kebijakan, bukan bukti bahwa desa tertentu tidak menerima bantuan.

Amanah pengelolaan dan perlindungan lingkungan (khalifah dan hifz al-bi'ah). Hamdi et al. (2025) mengaitkan tata kelola air dengan keadilan dan tanggung jawab, Mallongi et al. (2025) menekankan infrastruktur dan regulasi bagi keberlanjutan sumber air, Sukarni (2014) menempatkan air sebagai sumber daya kepentingan bersama, dan Faizal et al. (2025), melalui kajian pemikiran Ali Yafie, menempatkan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab manusia. Rujukan ini menjadi dasar normatif untuk mempertimbangkan pengelolaan sumber air dan kesiapsiagaan sebelum kemarau, bukan hanya distribusi saat krisis, dan tidak dipakai sebagai bukti empiris kondisi lingkungan di Cilacap. Karena data konservasi sumber air tidak dianalisis, pelaksanaan prinsip ini belum dapat dinilai.

Perlindungan harta (hifz al-mal). Ketiadaan data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga membuat penelitian ini belum dapat menilai apakah kelangkaan air menimbulkan kerugian ekonomi atau sejauh mana bantuan memengaruhi beban pengeluaran keluarga. Kekosongan data ini membatasi analisis, tetapi tidak dapat dianggap bukti bahwa dampak terhadap harta tidak terjadi.

D. Implikasi Kebijakan dan Sintesis dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan dan keterbatasan data, perbaikan tata kelola dapat diarahkan pada lima hal. Pertama, transparansi: pemerintah daerah dapat memublikasikan jumlah penerima per desa, frekuensi pengiriman, volume, sumber pendanaan, dan kriteria prioritas sebagai dasar evaluasi pemerataan. Kedua, pemetaan wilayah dengan kekeringan berulang untuk memperkuat persiapan sebelum kemarau (stok, jadwal distribusi, pendanaan); alternatif seperti embung, waduk, atau air tanah (Purnomo et al., 2021) perlu dikaji secara teknis, lingkungan, dan kebutuhan setempat, bukan diasumsikan

sesuai. Ketiga, pemantauan proaktif terhadap kondisi sumber air dan kebutuhan warga, termasuk di wilayah yang belum mengajukan permohonan. Keempat, pencatatan dampak sosial-ekonomi oleh BPBD bersama dinas terkait, mencakup biaya memperoleh air, gangguan mata pencaharian dan pertanian, serta indikator kesehatan, agar evaluasi tidak berhenti pada jumlah tangki atau volume. Kelima, penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat; pelibatan lembaga zakat, infak, dan sedekah dapat dikaji dengan kriteria, mekanisme penyaluran, akuntabilitas, dan pengawasan yang jelas. Data penelitian ini belum cukup untuk menentukan model kemitraan yang paling sesuai.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Faizah et al. (2023) dan Purnomo et al. (2021) memakai pendekatan teknis untuk memetakan kekeringan atau merumuskan penyediaan air, sedangkan sumber Cilacap terutama merekam permintaan dan penyaluran bantuan. Analisis strategi rumah tangga (Mulyono & Priantika, 2023) dan hubungan akses air dengan kemiskinan melalui data panel (Putri & Samsuddin, 2025) belum dapat direplikasi karena data rumah tangga dan seri panel tidak tersedia. Mustofa et al. (2022) mengingatkan pentingnya kerentanan sosial, dan Hamdi et al. (2025), Mallongi et al. (2025), Sukarni (2014), serta Faizal et al. (2025) menyediakan dasar normatif bagi penilaian kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab lingkungan. Kontribusi artikel ini karenanya bersifat kontekstual: bukan mengukur dampak yang belum didukung data, melainkan mengorganisasi pemberitaan kejadian dan bantuan air di Cilacap pada 2026, mempertemukannya dengan kerangka kesejahteraan dan Ekonomi Islam, serta menunjukkan aspek yang masih memerlukan data primer.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data sekunder yang ditelaah, pemberitaan mencatat penyaluran bantuan air bersih ke delapan desa pada awal Juli, menyebut 29 desa dan 232 tangki pada Agustus, serta melaporkan 89 desa dan 1.500 tangki dalam tiga laporan yang terbit pada 9-10 Oktober. Angka Oktober harus dibaca hati-hati karena batas waktu pencatatan dan definisi cakupannya tidak dirinci, dan kemunculannya pada beberapa media belum merupakan verifikasi independen apabila seluruhnya merujuk pada keterangan BPBD yang sama. Dari sisi kesejahteraan, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan kebutuhan bantuan dan kesulitan akses air di sebagian wilayah, tetapi belum memungkinkan kesimpulan tentang dampak terhadap pendapatan, pertanian, kesehatan, ataupun kemiskinan. Dalam perspektif maqashid syariah, penyediaan air

bersih selaras dengan upaya menjaga jiwa dan mewujudkan kemaslahatan, sementara keadilan distribusi dan perlindungan harta rumah tangga belum dapat dinilai tanpa data penerima dan pengeluaran yang lebih rinci. Informasi tentang desa dengan kekeringan berulang mendukung perlunya kesiapsiagaan dan pengelolaan sumber air jangka panjang, meskipun pilihan kebijakannya memerlukan kajian lokal yang lebih lengkap.

Pemerintah daerah disarankan memperkuat keterbukaan data bantuan, memantau desa yang mengalami kesulitan air secara proaktif, dan mencatat dampak sosial-ekonomi agar kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan hasil yang terukur. Mengingat keterbatasan penelitian yang bertumpu pada pemberitaan sekunder, penelitian berikutnya perlu melengkapi analisis ini dengan laporan primer BPBD dan data curah hujan aktual BMKG, serta survei atau wawancara rumah tangga apabila memungkinkan, untuk mengukur biaya memperoleh air, perubahan pendapatan, dan kondisi kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- Banyumas Ekspres. (2026a, 6 Juli). BPBD Cilacap salurkan 117.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan. <https://banyumasekspres.id/bpbd-cilacap-salurkan-117-000-liter-air-bersih-untuk-warga-terdampak-kekeringan/>
- Banyumas Ekspres. (2026b, 10 Juli). 12 kecamatan di Cilacap berpotensi kekeringan, BPBD salurkan 161 ribu liter air bersih. <https://banyumasekspres.id/12-kecamatan-di-cilacap-berpotensi-kekeringan-bpbd-salurkan-161-ribu-liter-air-bersih/>
- Banyumas Ekspres. (2026c, 10 Oktober). 89 desa di Cilacap terdampak kekeringan, bantuan air bersih tembus 1.500 tangki. <https://banyumasekspres.id/89-desa-di-cilacap-terdampak-kekeringan-bantuan-air-bersih-tembus-1-500-tangki/>
- BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah. (2026, 18 Maret). Prediksi musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah. https://staklim-jateng.bmkg.go.id/prediksi_musim_kemarau
- Faizah, E. N., Wijaya, A. P., & Sabri, L. M. (2023). Analisis daerah rawan kekeringan lahan sawah di Kabupaten Purworejo menggunakan sistem informasi geografis. *Elipsoida: Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2023.17890>

- Faizal, Abd Rahman R., & Zaenal Abidin. (2025). Analisis pemikiran Prof. Ali Yafie terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan melalui prinsip hifz al-bi'ah. Tahkim, 21(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v21i2.11506>
- Hamdi, F., Ladraa, K., Benjammour, M., Hafidzi, A., & Ilhami, H. (2025). Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic ethics for sustainable water management: A case study of Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 10(1), 1-19. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v10i1.11277>
- Ketik. (2026, 10 Oktober). 89 desa di Cilacap terdampak kekeringan, 1.500 tangki air bersih telah disalurkan. <https://ketik.com/cilacap/daerah/89-desa-di-cilacap-terdampak-kekeringan-1500-tangki-air-bersih-telah-disalurkan>
- Lingkar. (2026a, 4 Juli). BPBD Cilacap salurkan 117.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di 8 desa. <https://lingkar.news/jateng/bpbd-cilacap-salurkan-117-000-liter-air-bersih-untuk-warga-terdampak-kekeringan-di-8-desa/>
- Lingkar. (2026b, 17 Juli). Kekeringan meluas ke 15 desa di Cilacap, BPBD salurkan 390 ribu liter air bersih. <https://lingkar.news/jateng/kekeringan-meluas-ke-15-desa-di-cilacap-bpbd-salurkan-390-ribu-liter-air-bersih/>
- Mallongi, A. A., Fitri, A. A., Hastina, N., Annisa, I. N., & Sudarmin, A. B. M. (2025). Konsep Hifdz al-Bi'ah dalam pengelolaan sumber mata air alam untuk kesejahteraan umat. Jurnal Ruhul Islam, 3(2), 1-24. <https://doi.org/10.33476/jri.v3i2.257>
- Mulyono, J., & Priantika, D. M. (2023). Tindakan sosial masyarakat dalam pemenuhan air bersih pada daerah kekeringan di Dusun Tlogopule Kabupaten Tuban. Huma: Jurnal Sosiologi, 2(2), 106-117. <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i2.63>
- Mustofa, U., Nugroho, R. A., & Zammi, N. Z. (2022). Analisis kerentanan sosial Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap bencana kekeringan. Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 19(2), 65-70. <https://doi.org/10.21831/socia.v19i2.50674>
- Purnomo, S., Halik, G., Dhokhikah, Y., Absari, R. U., & Salsa, A. (2021). Penilaian bencana kekeringan dan strategi penyediaan air bersih di wilayah utara Kabupaten Lumajang. Jurnal Teknik Pengairan, 12(2), 92-103. <https://doi.org/10.21776/ub.pengairan.2021.012.02.02>
- Putri, B. D., & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh akses air minum layak dan akses sanitasi layak terhadap tingkat kemiskinan: Studi panel kabupaten di Jawa Barat

tahun 2020-2024. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 3(3), 140-156.

<https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1611>

Radar Banyumas. (2026a, 31 Juli). 22 desa di Kabupaten Cilacap alami kesulitan air bersih, 20.498 jiwa terdampak kekeringan.

<https://radarbanyumas.disway.id/cilacap/read/155056/22-des-a-di-kabupaten-cilacap-alami-kesulitan-air-bersih-20498-jiwa-terdampak-kekeringan>

Radar Banyumas. (2026b, 9 Oktober). Kekeringan di Cilacap berpotensi lebih parah dari tahun 2023, 89 desa terdampak.

<https://radarbanyumas.disway.id/cilacap/read/156973/kekeringan-di-cilacap-berpotensi-lebih-parah-dari-tahun-2023-89-des-a-terdampak>

Sukarni, S. (2014). Air dalam perspektif Islam. Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 12(1), 115-130.

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/85>

VIVA Banyumas. (2026, 9 Agustus). Kekeringan melanda Cilacap, BPBD salurkan 1,18 juta liter air bersih untuk 24.934 warga di 29 desa.

<https://banyumas.viva.co.id/news/12082-kekeringan-melanda-cilacap-bpbd-salurkan-118-juta-liter-air-bersih-untuk-24934-warga-di-29-des-a>